

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM
(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**ROFI NOPITA
NPM. 167110464**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rofi Nopita
NPM : 167110464
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 27 Agustus 2021

\

Turut Menyetujui, Pembimbing
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT., karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian (UP) yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)”**. Usulan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulisan UP ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Syafirinaldi, SH., MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan berusaha maksimal dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dengan benar hingga dapat diseminarkan;
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian ini;

5. Pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian.
6. Kepada Ayah, Ibu, dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis hingga selesainya penulisan usulan penelitian ini;
7. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupaun yang tidak disebutkan mendapat balasan amal kebaikan di sisi Allah SWT, *Amin*.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis

Rofi Nopita

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Administrasi	12
2. Konsep Administrasi Publik	16
3. Konsep Organisasi	17
4. Konsep Kebijakan Publik	28
5. Konsep Evaluasi	29
B. Kerangka Pikir	30
C. Konsep Operasional	31
D. Operasional Variabel	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Penarikan Sampel	38

E.	Jenis dan Sumber Data	38
F.	Teknik Pengumpulan Data	39
G.	Teknik Analisis Data	41
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian	42
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
A.	Profil Kabupaten Kuantan Singingi	45
B.	Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi	46
C.	Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A.	Identitas Responden	49
B.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	50
BAB VI	PENUTUP	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 – 2019.....	4
Tabel I.2	Lokasi/Wilayah Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Hingga Tahun 2020	5
Tabel I.3	Pembatasan Lokasi/Wilayah Penelitian tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Hingga Tahun 2020	7
Tabel II.1	Operasional Variabel Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)	33
Tabel III.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi).....	43
Tabel V.1	Usia Responden	49
Tabel V.2	Jenis Kelamin Responden	50
Tabel V.3	Mengidentifikasi Tujuan Program yang akan Dievaluasi....	51
Tabel V.4	Analisis Terhadap Masalah.....	53
Tabel V.5	Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan, Pengukuran terhadap Tingkatan Perubahan yang Terjadi	55

Tabel V.6	Menentukan Apakah Perubahan yang Diamati Merupakan Akibat dari Kegiatan tersebut atau karena Penyebab yang Lain	57
Tabel V.7	beberapa Indikator untuk Menentukan Keberadaan Suatu Dampak	58



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pikir tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)

31



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofi Nopita
NPM : 167110464
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga..

Pekanbaru, Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,

Rofi Nopita

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM
(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)**

Rofi Nopita
NPM. 167110464

ABSTRAK

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Kebijakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ketercapaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Variabel penelitian adalah evaluasi pelaksanaan, yaitu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, satu orang Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, satu orang Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, satu orang Seksi Prasarana, satu orang Kepala Seksi Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 6 orang juru parkir dan responden penelitian adalah 50 orang masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner, dimana asil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat diambil kesimpulan bahwa Potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bila dikaitkan dengan realisasi kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi belum tergali secara maksimal dan terukur, sehingga penerimaan daerah dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak optimal. Hal ini disebabkan karena Penetapan sistem pemungutan yang belum tepat dan baik, yang menyebabkan adanya kebocoran-kebocoran penerimaan retribusi parkir baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik dari oknum aparat/petugas pengelola parkir, juru parkir/koordinator parkir.

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION
OF KUANTAN SINGINGI REGENCY NUMBER 6 YEAR 2012
CONCERNING PARKING SERVICES ON
THE EDGE PUBLIC ROAD
(Study at the Department of Transportation, Information and
Communication)**

Rofi Nopita
NPM. 167110464

ABSTRACT

Keywords: Evaluation, Implementation, Policy

This study aims to determine and analyze the level of achievement of the implementation of the Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency Number 6 of 2012 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads and to find out the inhibiting factors for the implementation of the Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency Number 6 of 2012 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. The research variable is the implementation evaluation, namely activities involving the estimation or assessment of the policy which includes the substance, implementation and impact of the implementation of the policy. This type of research is qualitative and quantitative research with descriptive methods. The location of this research is the Department of Transportation, Information and Communication, Kuantan Singingi Regency. The informants in this study were one Head of the Information and Communications Transportation Service, one Secretary of the Information and Communication Transportation Service, one Head of Infrastructure and Safety, one Infrastructure Section, one Head of Retribution Section of the Kuantan Singingi Regency Regional Revenue Agency, 6 people parking attendants and research respondents are 50 people who use parking services. The data of this study were sourced from primary data obtained through interviews and questionnaires, where the results of this study were analyzed descriptively. Based on the results of the study, it is known that the evaluation of the implementation of the Kuantan Singingi Regency regional regulation No. 6 of 2012 concerning parking service fees on the edge of public roads can be concluded that the potential for parking service fees on the edge of public roads when associated with the realization of its contribution to the PAD of Kuantan Singingi Regency has not been fully explored. maximum and measurable, so that regional revenues from the collection of parking service fees on the edge of public roads are not optimal. This is due to the determination of the collection system that is not appropriate and good, which causes leaks of parking retribution receipts, both intentional and unintentional, from unscrupulous officers/parking management officers, parking attendants/parking coordinators.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang melaksanakan otonomi daerah. Karena wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan yang sangat luas, dimana wilayahnya dibagi-bagi dalam bentuk provinsi. Oleh sebab itu diperlukan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan hukum otonomi daerah. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang 1945, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Pemerintah daerah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 18 Ayat 2, yaitu: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah.”

Sebagai upaya implementasi otonomi daerah di Indonesia, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Tanggal 15 Oktober 2004. Kemudian pada Tanggal 2 Oktober 2014, undang-undang tersebut mengalami revisi dan berubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana istilah otonomi daerah dalam Pasal 1 Ayat 5 undang-undang tersebut ialah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri Urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Keasatuan Republik Indonesia.”

Urusan Pemerintah yang dimaksud dalam perundangan tersebut terdapat dalam Pasal 9, yaitu:

- (1) “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum
- (2) urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
- (3) urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
- (4) urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
- (5) urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.”

Berdasarkan perundangan tersebut, bahwa urusan pemerintah terbagi menjadi tiga urusan, yaitu: (1) urusan pemerintah absolut; (2) urusan pemerintah konkuren; dan (3) urusan pemerintah umum. Dari ketiga urusan tersebut, hanya urusan pemerintah konkuren yang dibagi kepada pemerintah daerah. Dimana urusan pemerintah konkuren dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

- (1) “Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.”

Urusan pemerintah mengenai retribusi parkir termasuk ke dalam Urusan Pemerintah Pilihan. Karena tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Retribusi parkir sebagai salah satu upaya untuk menambah pemasukan daerah dan sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan daerah dalam mengelola daerah otonomnya. Agar pelaksanaan retribusi dapat berjalan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuklah Undang-undang tentang retribusi parkir di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa “Daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Kebijakan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terkait retribusi parkir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan diurus oleh Pemerintah Daerah agar fasilitas umum seperti jalan menjadi tertib dan dapat menjadi pemasukan kas daerah atau menjadi pendapata asli daerah. Berikut keadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi parkir tepi jalan.

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 – 2019

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi	Persentase
1	2017	Rp. 150.000.000,00	Rp. 102.900.000,00	68,60%
2	2018	Rp. 150.000.000,00	Rp. 27.051.000,00	18,03%
3	2019	Rp. 150.000.000,00	Rp. 51.200.000,00	34,13%
Total		Rp. 450.000.000,00	Rp. 181.151.000,00	40,26%

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*

Berdasarkan tabel I.1 tersebut di atas, bahwa retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2017 – 2019 tidak terealisasi sesuai target PAD yang telah ditetapkan. Realisasi PAD terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu hanya 18,03% dari target PAD. Sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu 68,60% dari target PAD. Selama periode 3 tahun (2017 – 2019), hanya terealisasi PAD sebesar 40,26% dari retribusi parkir tepi jalan umum. Dengan demikian, seharusnya retribusi parkir tepi jalan umum harus selalu diawasi dan dapat ditingkatkan realisasinya, karena banyaknya lokasi retribusi parkir tepi jalan umum yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut daftar tepi jalan umum yang masuk ke dalam retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Kuantan Singingi hingga Tahun 2020.

Tabel I.2 Lokasi/Wilayah Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Hingga Tahun 2020

No.	Lokasi Retribusi	Wilayah Administrasi
1	Jalan Tuanku Tambusai depan Bank Negara Indonesia	Kecamatan Kuantan Tengah
2	Jalan Linggar Jati (depan pagar kantor Kapolsek dari gapura hingga bagian kiri dan kanan Jalan Kesehatan)	Kecamatan Kuantan Tengah
3	Jalan Linggar Jati (depan taman dari gapura hingga simpang Jalan Kuantan)	Kecamatan Kuantan Tengah
4	Jalam Umum dari Indomater hingga simpang tiga Jalan Tuanku Tambusai	Kecamatan Kuantan Tengah
5	Jalan Kesehatan depa UGD Rumah Sakit Umum Teluk Kuantan	Kecamatan Kuantan Tengah
6	Jalan Jenderal Sudirman (Zona Cafe sampai dengan Toko Restu)	Kecamatan Kuantan Tengah
7	Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Raya lama sampai dengan kedai kopi Harum Baru)	Kecamatan Kuantan Tengah
8	Jalan Jenderal Sudirman (Simpang tiga kedai kopi Harum Baru sampai dengan toko Mas Diamond)	Kecamatan Kuantan Tengah
9	Jalan Jenderal Sudirman (Gang toko Mas Diamond sampai dengan kedai kopi Mandiri)	Kecamatan Kuantan Tengah
10	Jalan Imam Bonjol (Dialer Honda Acun sampai dengan Toko Mekarsari)	Kecamatan Kuantan Tengah
11	Jalan Kuantan (Simpang Linggar Jati sampai dengan Jalan Imam Bonjol)	Kecamatan Kuantan Tengah
12	Jalan Petapahan	Kecamatan Kuantan Tengah
13	Jalan Gunung Kesiangan	Kecamatan Kuantan Tengah
14	Jalan Imam Bonjol (Simpang empat Ahun sampai dengan Simpang Jalan Kuantan)	Kecamatan Kuantan Tengah
15	Jalan Jenderal Sudirman (Simpang empat Ahun sampai dengan simpang empat Sawah)	Kecamatan Kuantan Tengah
16	Jalan Merdeka	Kecamatan Kuantan Tengah
17	Jalan Kartini	Kecamatan Kuantan Tengah
18	Jalan Imam Munandar (BAF sampai dengan jembatan atau Bakery Safary)	Kecamatan Kuantan Tengah
19	Jalan Imam Munandar (khusus depan Bank Mandiri)	Kecamatan Kuantan Tengah

No.	Lokasi Retribusi	Wilayah Administrasi
20	Pasar Cerenti	Kecamatan Cerenti
21	Pasar Inuman	Kecamatan Inuman
22	Pasar Baserah	Kecamatan Kuantan Hilir
23	Pasar Baru Pangean	Kecamatan Pangean
24	Pasar Logas Tanah Darat	Kecamatan Logas Tanah Darat
25	Pasar Benai	Kecamatan Benai
26	Pasar Muara Lembu	Kecamatan Singingi
27	Pasar Koto Baru	Kecamatan Singingi Hilir
28	Pasar Gunung Toar	Kecamatan Gunung Toar
29	Pasar Lubuk Jambi	Kecamatan Kuantan Mudik
30	Pasar Lubuk Ambacang	Kecamatan Hulu Kuantan

Sumber : *Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*

Instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola atau mengimplementasikan peraturan tersebut adalah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bahwa “Instansi Pelaksana adalah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi.” Dalam hal ini peneliti hanya membatasi pelayanan parkir di tepi jalan umum berikut:

Tabel I.3 Pembatasan Lokasi/Wilayah Penelitian tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Hingga Tahun 2020

No.	Lokasi Retribusi	Wilayah Administrasi	Jumlah Juru Parkir
1	Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Raya lama sampai dengan kedai kopi Harum Baru)	Kecamatan Kuantan Tengah	2 Orang
2	Jalan Jenderal Sudirman (Simpang tiga kedai kopi Harum Baru sampai dengan toko Mas Diamond)	Kecamatan Kuantan Tengah	2 Orang
3	Jalan Jenderal Sudirman (Gang toko Mas Diamond sampai dengan kedai kopi Mandiri)	Kecamatan Kuantan Tengah	2 Orang
Jumlah			6 Orang

Sumber : *Olahan Data Penelitian, 2020*

Penelitian ini dibatasi pada tiga tepi jalan umum tersebut sebagaimana Tabel I.3 tersebut di atas, yaitu berada di wilayah administrasi Kecamatan Kuantan Tengah. Dimana di setiap lokasi parkir tersebut, terdapat dua orang juru parkir. Sehingga jumlah juru parkir di lokasi yang diteliti adalah enam orang juru parkir. Namun, semua pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi, dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa “Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan.” Kemudian dalam Pasal 3

Ayat (1) dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Susunan organisasi Dinas

Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan:
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Seksi Pengembangan.”

Urusan parkir di tepi jalan umum adalah bagian dari tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan, yaitu tugas Seksi Prasarana. Sebagaimana Pasal 19 poin (g) dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2016, bahwa “Menyelenggarakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.” Namun Perbup dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tersebut belum terlaksana dengan optimal sebagaimana mestinya, karena berdasarkan observasi di berbagai lokasi retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Kuantan Singingi masih ditemui fenomena-fenomena berikut:

1. Terindikasi masih adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat, tetapi tetap melakukan pemungutan jasa parkir sebagaimana mestinya;
2. Terindikasi juru pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana karena telah mengabaikan karcis parkir dalam pemungutan jasa parkir, sementara

uang pungutan jasa parkir yang dihitung pemerintah adalah berdasarkan karcis parkir yang sudah terpakai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian lebih lanjut mengenai evaluasi Perda tersebut, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi).”**

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat ketercapaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?
2. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat ketercapaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir, serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusinya
- 2) Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu terkait Administrasi Publik.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- 1) Bahan referensi bagi pihak peneliti lainnya terkait permasalahan penelitian yang sama
- 2) Bahan masukan dalam mengatasi permasalahan retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Secara Akademik

Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya di FISIPOL Universitas Islam Riau khususnya tentang retribusi pelayanan parkir agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mencakup keseluruhan aktivitas kerja sama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah disepakati bersama-sama sebelumnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup dan memenuhi kebutuhannya dengan sendiri namun dalam memenuhi kebutuhannya yang beragam akan membutuhkan orang lain. Berarti akan terjalinnya kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, ini juga bisa dikatakan kegiatan administrasi secara sederhana.

Kata administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministro* (latin) yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Definisi administrasi yang sederhana ini adalah suatu proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan (Fathoni, 2006: 17).

Dalam arti sempit administrasi adalah tata usaha. Sedangkan pada pengertian luas administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya itu pada umumnya dilakukan dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Syafiie, 2014: 65).

Definisi yang sederhana dari administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Sedangkan menurut Pasolong (2017: 3) administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Siagian dalam Fathoni (2006: 15) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian Heneman dalam Fathoni (2006: 15) memberikan pengertian administrasi adalah administrasi sebagai kegiatan dari sekelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Secara konseptual administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit, diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha (*clerical work dan office work*) yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerja sama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama (Rachmat, 2010: 77).

Sementara itu, menurut The liang gie (dalam Syafiie, 2010: 14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Kebijakan negara tersebut dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga administrasi negara sering kali disebut pelaksanaan hukum yang dibuat oleh lembaga lehislatif. Dalam kaitan itu pula, secara silih berganti administrasi negara diberi predikat sebagai:

- a. Penyelenggaraan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (Pffifner dalam Nawawi, 2013: 84)
- b. Terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara (White dalam Nawawi, 2013: 84)

Dalam hal ini hubungan ini maka yang termasuk ke dalam lingkup administrasi negara bukan saja mengenai masalah pelaksanaan kebijakan tetapi juga masalah perumusan dan penentuan kebijakan (White dalam Nawawi, 2013: 84).

Hal ini yang dapat di cermati dari sejumlah defenisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Menurut Pasolong (2017: 3) terdapat beberapa dimensi karakteristik administrasi yang terdiri atas:

- a. Efisien berarti bahwa tujuan (*motive*) dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien.
- b. Efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai sehubungan sebab akibat.

- c. Rasional berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar atau sengaja.

Pasolong (2017: 3) menambahkan bahwa terdapat beberapa dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerja sama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai

Selanjutnya menurut Admosudirjo mengemukakan administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman (dalam Zulkifli dan Moris 2014:13)

Selanjutnya menurut Leonard D. White mendefinisikan administrasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai Lembaga untuk macam-macam kepentingan sesuai yang dikehendakinya (dalam Zulkifli dan Moris 2014:11).

Dari pengertian di atas di atas bahwasannya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang diinginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi. Dari pengertian di atas jelas bahwa administrasi sebagai proses kerjasama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia.

2. Konsep Administrasi Publik

Menurut Pasolong (2011:10), bahwa “Istilah administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu ‘ad’ dan ‘*ministrare*’ yang berarti ‘to serve’ yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.” Sedangkan menurut Dunsire dalam Keban (2008:2), administrasi diartikan sebagai “Arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoretik.”

Terdapat empat prinsip administrasi menurut Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14), yaitu sebagai berikut:

- a. “Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok;
- b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti;
- c. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil;
- d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.”

Administrasi publik menurut pendapat Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4), adalah “Proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”

Menurut pendapat Keban (2008:4) administrasi publik “Menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.”

3. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, dimana administrasi merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dan tentunya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai tersebut perlu adanya tempat (wadah) yang dinamakan organisasi. Organisasi sebagai wadah sekumpulan manusia yang bekerjasama secara rasional dalam menjalankan kegiatan administrasi dan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan organisasi sebagai rangkaian interaksi manusia bersifat dinamis yaitu terus bergerak dan berkembang mengarah ke arah yang lebih baik.

Secara sederhana, organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Dari definisi sederhana itu, maka sebuah organisasi minimal memiliki ciri antara lain terdiri daripada dua orang atau lebih, yang di dalamnya terjadi berbagai hubungan kerja sama antar-individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri (internal) maupun ke luar (esksternal) (Rachmat, 2010: 73).

Menurut Barnad dalam Fathoni (2006: 26) merupakan suatu sistem, yaitu sistem sosial yang dinamis dari hubungan kerja sama yang bertujuan untuk memuaskan keperluan orang-orang. Sedangkan menurut Gullet dalam Fathoni (2006: 26) organisasi sebagai suatu proses yang tersusun dalam orang-orang berhubungan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Massie, organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan Bersama (dalam Zulkifli dan Moris 2014: 78). Selanjutnya menurut Max Weber Organisasi merupakan sebuah system yan terdiri dari aneka raga, eemen dan subsistem, dinantara ,ama dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang saling bersangkutan (dalam Thoha 2012:112).

Menurut Robbins (2003: 4), organisasi sebagai *a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary that function*

or relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goal (sebagai entitas sosial sadar dikoordinasikan, dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi berfungsi atau dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan).

Menurut Manullang dalam Hasibuan (2006: 119) menyatakan bahwa organisasi adalah

Suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas.

Menurut Dale dalam Subkhi dan Jauhar (2013: 3) organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Sedangkan menurut Soffer dalam Subkhi dan Jauhar (2013: 3) organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian di mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Siagian (dalam Zulkifli, 2009: 71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan menurut Allen tentang organisasi adalah sebagai berikut :

“Organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan (dalam Hamim, 2005: 2).

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli, 2009: 71).

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Sedangkan organisasi menurut Pradjudi Atmosudiro dalam Hasibuan, (2006: 120) adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek penting dari definisi-definisi di atas, adalah:

- a. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
- b. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang
- c. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan
- d. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
- e. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati
- f. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas
- g. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi
- h. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi

Menurut Hasibuan (2006: 122) yang termasuk kedalam unsur-unsur organisasi adalah:

- a. Manusia (*human factor*) artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan)

- b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya
- c. Tujuan artinya organisasi itu baru ada, jika ada tujuan yang ingin dicapai
- d. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya
- e. Struktur, artinya organisasi itu baru ada, jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya
- f. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis
- g. Lingkungan (environment external social system) artinya organisasi itu baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

Menurut Subkhi dan Jauhar (2013: 123) organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan harus didasarkan pada asas. Beberapa asas dalam organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Asas tujuan organisasi (*principle of organizational objectives*).

Tujuan organisasi harus jelas dan rasional, apakah bertujuan untuk mendapatkan laba ataukah memberikan pelayanan. Hal ini merupakan bagian penting dalam menentukan struktur organisasi.

- b. Asas kesatuan tujuan (*principle of unity of objective*)

Suatu organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan.

- c. Asas kesatuan perintah (*principle of unity of command*)

Setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggung jawaban hanya kepada satu orang atasan, namun seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan.

d. Asas rentang kendali (*principle of the span of management*)

Seorang manajer hanya dapat secara efektif memimpin sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai 9 orang. Jumlah bawahan ini tergantung kecakapan dan kemampuan manajer bersangkutan.

e. Asas pendelegasian wewenang (*principle of delegation of authority*)

Pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain hendaknya jelas dan efektif sehingga seorang manajer mengetahui wewenangnya

f. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab (*principle of parity of authority dan responsibility*)

Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul harus sama besarnya. Wewenang yang didelegasikan hendaknya tidak meminta pertanggung-jawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri ataupun sebaliknya.

g. Asas tanggung jawab (*principle of responsibility*)

Pertanggung jawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang (*line authority*) dan pelimpahan wewenang. Dengan kata lain, seseorang hanya akan bertanggung jawab kepada orang yang melimpahkan wewenang tersebut.

h. Asas pembagian kerja (*principle of departmentation*)

Pengelompokkan tugas-tugas, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut.

i. Asas penempatan personalia (*principle of personnel placement*)

Penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian dan keterampilannya (*the right man, in the right job*): mismanagement penempatan harus dihindarkan. Efektivitas organisasi yang optimal memerlukan penempatan karyawan yang tepat. Untuk itu harus dilakukan seleksi yang objektif dan berpedoman atas job specification dari jabatan yang akan diisinya.

j. Asas jenjang berangkai (*principle of scalar chain*)

Saluran perintah atau wewenang dari atas kebawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jarak terpendek. Hal ini penting, karena dasar organisasi yang fundamental adalah rangkaian wewenang dari atas ke bawah.

k. Asas efisiensi (*principle of efficiency*)

Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi harus mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal

l. Asas kesinambungan (*principle of continuity*)

Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya

m. Asas koordinasi (*principle of coordination*)

Ini merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi dimaksudkan untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan, supaya terarah pada sasaran yang ingin dicapai

Subkhi dan Jauhar (2013: 134) menambahkan bahwa bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas:

a. Organisasi garis (lini)

Ini merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana yang diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi.

b. Organisasi garis dan staf

Ini dianut oleh organisasi besar, di mana daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawan banyak. Staf adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas untuk memberi nasihat dan saran, sesuai bidangnya, kepada pejabat pimpinan dalam organisasi.

c. Organisasi fungsional

Organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas.

d. Organisasi panitia

Organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja, di mana setelah tugas selesai, maka selesainya organisasi tersebut.

Menurut Sopiah (2008: 2) menyatakan bahwa sekumpulan orang dapat dikatakan sebagai organisasi jika memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

a. Organisasi merupakan suatu sistem

Sistem adalah suatu integrasi elemen-elemen yang semuanya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem mencakup tiga unsur utama, yaitu input, transformasi dan output. Ada dua sistem, yaitu sistem yang tertutup dan sistem yang terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang dapat mengendalikan operasinya sendiri, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri.

b. Adanya suatu pola aktivitas

Aktivitas yang dilakukan suatu organisasi mengikuti suatu pola tertentu. Ada urutan-urutan kegiatan yang sistematis dan relatif terus berulang. Aktivitas yang dilakukan secara insidental tidaklah berada dalam koridor suatu organisasi.

c. Adanya sekelompok orang

Dua orang manusia atau lebih yang memiliki tujuan yang sama berkumpul untuk bekerja sama, menggalang kekuatan agar tujuan mereka dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin. Itulah organisasi. Individu-individu tersebut memilih bergabung dengan

individu yang lain karena mereka menyadari bahwa diri mereka memiliki sejumlah keterbatasan dan dengan bekerja sama itu maka masing-masing individu akan memiliki kekuatan. Dengan kekuatan tersebut maka tujuan mereka akan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

d. Adanya tujuan

Tujuan yang sama merupakan dasar bagi individu-individu untuk bergabung. Tujuanlah yang menjadi semangat orang-orang untuk bekerja sama. Tujuanlah yang memandu setiap elemen yang ada dalam organisasi untuk bergerak. Tujuanlah yang menjadi arah yang akan dituju oleh segenap elemen itu.

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005: 98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Organisasi dan Tujuan

Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi

b. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual.

Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.

c. **Tanggung Jawab dan Otoritas**

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka

d. **Spesialisasi untuk Efisiensi**

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian-bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

e. **Rentang Kendali**

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer

Masih terkait dengan organisasi, budaya organisasi merupakan sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi, yang menjadikannya ciri khas sebagai sebuah organisasi. McShane dan Von Glinow dalam Priansa dan Agus (2015: 77) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan pola dasar dari nilai dan asumsi organisasi yang mengarahkan pegawai dalam organisasi untuk berpikir dan bertindak terhadap masalah dan kesempatan.

Jadi dapat diartikan organisasi merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama menjalankan serangkaian aktivitas dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat pembagian kerja dan sumber daya organisasi dalam rangka memuaskan atau memberikan pelayanan (Barang/jasa) terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia.

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi, yang efektif dan efisien, dan organisasi merupakan sarana atau wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Kebijakan Publik

Menurut pendapat Winarno (2002:17), “Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.”

Kemudian menurut Nugroho (2008:185), bahwa “Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.” Sedangkan Subarsono (2005:3) mengatakan “Kebijakan publik dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.”

Terdapat alasan pentingnya mempelajari kebijakan publik menurut Anderson dan Dye dalam Suharno (2010:16-19), yaitu:

1) “Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2) Alasan Professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.”

5. Konsep Evaluasi

Vendrug dalam Wirawan (2011:16) mengatakan “Istilah evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa yang akan

datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin.” Kemudian Ndraha (2003:201) mengatakan evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada beberapa model evaluasi diantaranya adalah *before-after* (sebelum dan sesudah), yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (*treatment*).

Evaluasi menurut Agustino (2006:175) “Ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.” Sedangkan menurut Wriawan (2011:7) “Evaluasi adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

Menurut Suchman *dalam* Nugroho (2003:199) bahwa “Enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

Untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan evaluasi program, kita harus memperhatikan unsur-unsur dalam kegiatan atau penggarapannya. Ada tiga unsur penting di dalam kegiatan atau penggarapan suatu kegiatan, yaitu:

- a) *What* = apa yang dikerjakan
- b) *Who* = siapa yang mengerjakannya, dan

c) *How* = bagaimana cara mengerjakannya

2) Analisis terhadap masalah

Merupakan kemampuan untuk mengenal elemen elemen situasi dalam permasalahan dan memahami komponen mana saja yang kritis; kemampuan untuk mengenal aktivitas kritis yang dilakukan agar dapat mengurutkan (*breakdown*) proses proses aktivitas tersebut dalam beberapa komponen aktivitas.

3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Menguraikan dan menentukan standar untuk pelaksanaan kegiatan atau hasil yang ingin diperoleh dalam batasan-batasan tertentu dalam kegiatan tertentu.

4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

Pengukuran efek dan dampak sebuah program/kebijakan pada masyarakat sebelum dan sesudah program atau kegiatan itu dilaksanakan.

5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

Berkaitan dengan jumlah perubahan dan persentase peningkatan perubahan dari dilaksanakannya

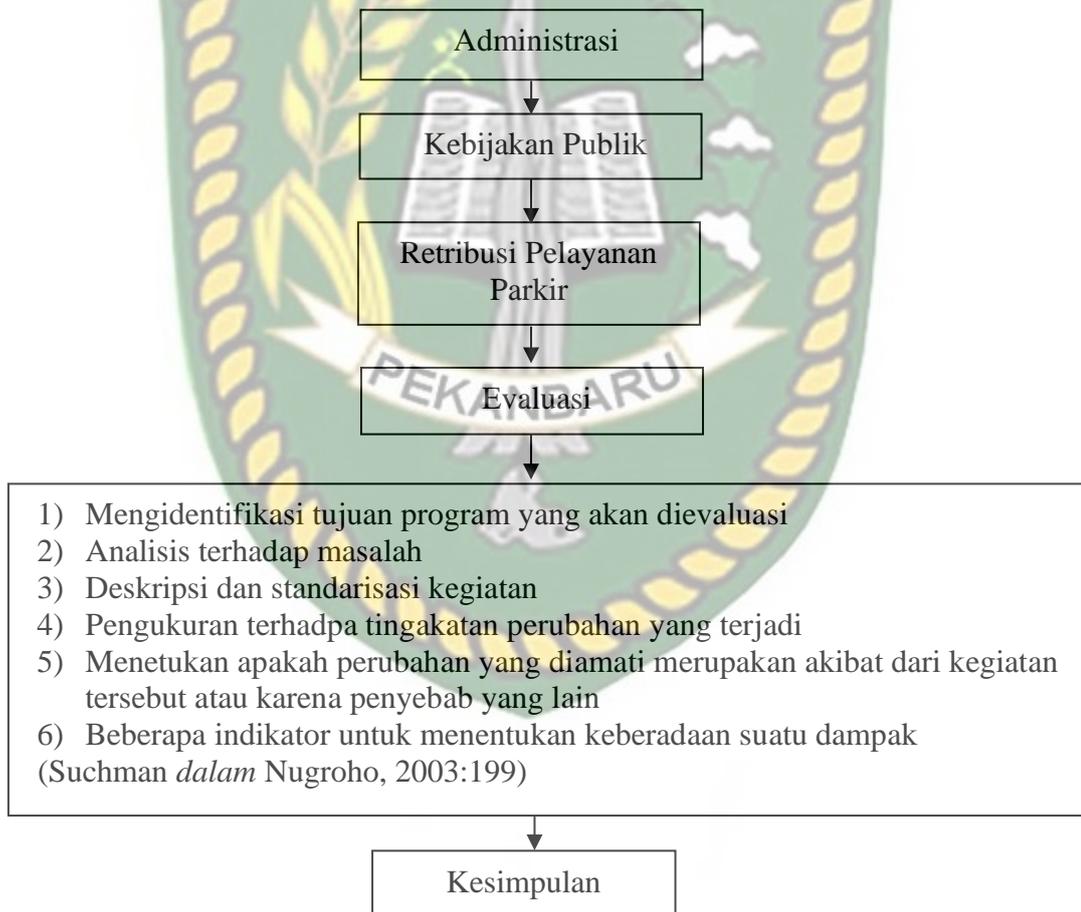
6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.”

Merupakan dapat dilihat dari meningkatkan program, baiknya sikap masyarakat dan juga sikap pelaksana.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari administrasi dan diakhiri dengan kesimpulan, dan disesuaikan dengan variabel penelitian, yaitu evaluasi. Lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1. Kerangka Pikir tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Konsep yang perlu dioperasionalkan terkait judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi
- 2) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; yaitu berkaitan dengan dasar pembentukan, alasan, dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurut Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi
- 3) Analisis terhadap masalah; yaitu berkaitan dengan masalah, kaitan masalah, dan adanya kesesuaian masalah retribusi parkir di tepi jalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 4) Deskripsi dan standarisasi kegiatan; yaitu berkaitan dengan sistem kerja dan acuan kerja Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 5) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; yaitu berkaitan dengan jumlah perubahan dan persentase peningkatan perubahan dari

dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- 6) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain; yaitu berkaitan dengan bentuk perubahan akibat Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum atau tidak
- 7) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak; yaitu dapat dilihat dari meningkatkan retribusi parkir, baiknya sikap masyarakat, dan adanya revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum agar terlaksana secara optimal.

E. Operasional Variabel

Variabel penelitian ini adalah evaluasi. Karena evaluasi dalam penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka variabel penelitian adalah evaluasi kebijakan. Sehingga diperoleh operasional variabel seperti tabel berikut.

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut (Anderson dalam Winarno, 2007:166)	Evaluasi pelaksanaan Perda	1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;	1) Dasar pembentukan Perda 2) Alasan pembentukan Perda 3) Tujuan utama pembentukan Perda	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2) Analisis terhadap masalah;	1) Masalah yang ditemui di lapangan 2) Kaitan masalah dengan Perda 3) Perda dibuat sesuai untuk mengatasi masalah yang ada	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan;	1) Sistematis kerja Perda 2) Acuan kerja Perda	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		4) Pengukuran terhadap tingkatan	1) Jumlah perubahan yang	Terlaksana Cukup Terlaksana

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
		perubahan yang terjadi;	terjadi 2) Persen peningkatan pada setiap tahun	Kurang Terlaksana
		5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain; dan	1) Bentuk perubahan yang terjadi 2) Bentuk perubahan ada di dalam Perda	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak (Suchman dalam Nugroho, 2003:199)	1) Meningkatkan retribusi mendirikan, memperbaiki, dan membongkar bangunan 2) Sikap masyarakat 3) Selalu dilakukan revisi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020

F. Teknik Pengukuran

Adapun untuk melihat upaya yang dilakukan dengan melihat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) dilakukan penilaian dengan menggunakan teori skala Likert. Menurut Sugiyono (2010: 93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berdasarkan teori tersebut maka dapat di ketahui bahwa ditetapkan ukuran: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik terhadap seluruh indikator yang ada, dengan penilaian sebagai berikut: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) dikategorikan:

Terlaksana : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

Adapun indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

Terlaksana : Apabila indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

2. Analisis terhadap masalah

Terlaksana : Apabila indikator analisis terhadap masalah pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila indikator analisis terhadap masalah pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan

dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator analisis terhadap masalah pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Terlaksana : Apabila indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan

dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

Terlaksana : Apabila indikator pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila indikator pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi

dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

Terlaksana : Apabila indikator menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila indikator menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Terlaksana : Apabila indikator beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila indikator beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Menurut pendapat Rianse (2009:7), kualitatif adalah “Meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya. Karena itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati, dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.” Menurut pendapat Sugiyono (2015:4), deskriptif adalah “Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi. Karena instansi tersebut yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Raya lama sampai dengan kedai kopi Harum Baru), Jalan Jenderal Sudirman (Simpang tiga kedai kopi Harum Baru sampai dengan toko Mas Diamond), dan Jalan Jenderal Sudirman (Gang toko Mas Diamond sampai dengan kedai kopi Mandiri).

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut pendapat Sugiyono (2015:90) adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Menurut pendapat Sugiyono (2015:116), sampel adalah “Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Melalui pendapat tersebut, maka populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Subjek	Populasi	Sampel	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi	1	1	100%
2	Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi	1	1	100%
3	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	1	1	100%
4	Seksi Prasarana	1	1	100%
5	Kepala Seksi Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100%
6	Juru Parkir di Tepi Jalan Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Raya lama sampai dengan kedai kopi Harum Baru), Jalan Jenderal Sudirman (Simpang tiga kedai kopi Harum Baru sampai dengan toko Mas Diamond), dan Jalan Jenderal Sudirman (Gang toko Mas Diamond sampai dengan kedai kopi Mandiri)	6	6	100%
7	Masyarakat yang menggunakan jasa parkir	-	50	-
	Jumlah		61	100%

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus dan teknik *accidental sampling*. Dimana untuk teknik sensus digunakan untuk: (1) Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi; (2) Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi; (3) Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan; (4) Seksi Prasarana; (5) Kepala Seksi Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; dan (6) juru parkir di Tepi Jalan Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Raya lama sampai dengan kedai kopi Harum Baru), Jalan Jenderal Sudirman (Simpang tiga kedai kopi Harum Baru sampai dengan toko Mas Diamond), dan Jalan Jenderal Sudirman (Gang toko Mas Diamond sampai dengan kedai kopi Mandiri). Sedangkan teknik *accidental sampling* digunakan untuk penarikan sampel dari masyarakat yang menggunakan jasa parkir.

Menurut Sugiyono (2015:55) teknik sensus adalah “Teknik penentuan sampel bila seluruh elemen populasi dijadikan sampel penelitian.” Sedangkan teknik *accidental sampling* menurut Sugiyono (2012: 95) adalah “Penentuan sampel berdasarkan kebetulan.” Dengan demikian, total seluruh sampel penelitian ini adalah 61 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer atau data utama/pokok penelitian, yaitu berupa data hasil wawancara tentang evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung penelitian ini berupa profil, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Hadi dalam Sugiyono (2012:166) mengatakan observasi sebagai “Suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam.” Melalui pendapat tersebut, maka yang diamati dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan gejala atau fenomena permasalahan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Wawancara

Terdapat beberapa macam jenis wawancara menurut pendapat Esterberg dalam Sugiyono (2012:233), yaitu: (1) *wawancara terstruktur* (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan); (2) *wawancara semiterstruktur* (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemmasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya); dan (3) *wawancara tidak terstruktur* (merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya).” Melalui pendapat tersebut, maka penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai data pokok untuk mengetahui evaluasi dan hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana pertanyaan disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan dan indikator variabel penelitian.

3. Kuesioner

Menurut Riduwan (2012:25), bahwa “Kuesioner (*questionnaire*) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.” Pertanyaan kuesioner penelitian ini berisikan tentang pelayanan parkir tepi jalan

umum, dan yang diberikan kuesioner penelitian adalah masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Dokumentasi

Menurut pendapat Sugiyono (2013:240), bahwa “Dokumentasi merupakan teknik pencatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang”. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi, baik itu berupa profil atau sejarah, struktur organisasi, maupun tugas pokok dan fungsinya.

5. Kepustakaan

Kepustakaan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep teori variabel penelitian. Dimana kepustakaan yang digunakan adalah terkait konsep dan indikator evaluasi. Tujuannya sebagai pedoman pembuatan teknik ukur dan instrumen penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data didapatkan dari jawaban wawancara responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara. Setiap hasil wawancara dianalisis dan dibahas secara deskriptif.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten

Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Singingi, yaitu 1.953,66 km², kemudian diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir seluas 1.530,97 km² (Sumber: kuansing.go.id)

B. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

Pembentukan Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Perhubungan. Keputusan Mendagri Nomor 130 –67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota.

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan dipertegas lagi oleh Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah bahwa Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi utusan pemerintah dibidang perhubungan, informasi dan komunikasi

2. Fungsi

- a) Merumuskan kebijakan teknis, dibidang Perhubungan Informasi Dan Komunikasi
- b) Menyusun rencana program dan anggaran dibidang Perhubungan Informasi Dan Komunikasi
- c) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas tugas dibidang Perhubungan Informasi Dan Komunikasi
- d) Pemberian kegiatan teknis perizinan dan/atau rekomendasi
- e) Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

- f) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Uraian Tugas Pokok

D. Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi

Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan, seperti pelatihan dan sebagainya.

Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang baik sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Pegawai dan Tenaga Honorer sebanyak 93 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang dan Tenaga Honor 57 orang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Usia

Usia responden dalam penelitian ini didominasi oleh rentang usia 35 hingga 43 tahun sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.1 Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	2	3	4
1	17 – 25	7	14%
2	26 – 34	19	38%
3	35 – 43	21	42%
4	> 43	3	6%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh rentang usia 35 hingga 43 tahun sebanyak 21 orang responden dengan persentase 42%. Sementara responden yang paling sedikit dengan kisaran usia > 43 tahun dengan jumlah sebanyak 3 orang responden dengan persentase 6%.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.2 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Laki-laki	34	68%
2	Perempuan	16	32%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel di atas diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 34 orang responden dengan persentase 68%. Sedangkan responden perempuan dengan frekuensi 16 orang responden dengan persentase 32%. Disimpulkan bahwa umumnya responden penelitian adalah laki-laki yang merupakan pengguna jasa parkir paling banyak selama ini.

B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Hasil penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan 11 orang key informan, yaitu wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, Seksi Prasarana dan Juru Parkir. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari jawaban kuesioner 50 orang responden yaitu masyarakat yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum.

Masing-masing pertanyaan wawancara dan kuesioner disusun berdasarkan indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain dan beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Dimana masing-masing indikator diberikan dua hingga tiga pertanyaan. Hasil wawancara dan kuesioner dari indikator-indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi Tujuan Program Yang Akan Dievaluasi

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.3 Mengidentifikasi Tujuan Program yang Akan Dievaluasi

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Dasar pembentukan Perda	13	21	16	50
2	Alasan pembentukan Perda	17	22	11	50
3	Tujuan utama pembentukan Perda	12	24	14	50
Jumlah		42	67	41	150
Rata-rata		14	22	14	50
Persentase		28%	44%	28%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan diketahui untuk indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi termasuk pada kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terlaksana sebanyak 22 orang (44%), kemudian menjawab terlaksana dan kurang terlaksana masing-masing sebanyak 14 orang (28%).

Pada item penilaian dasar pembentukan Perda responden yang menjawab terlaksana sebanyak 13 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 16 orang. Pada item penilaian alasan pembentukan Perda responden yang menjawab terlaksana sebanyak 17 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11 orang. Pada item penilaian tujuan utama pembentukan Perda responden yang menjawab terlaksana sebanyak 12 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 14 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Untuk dasar pembentukan Perda sudah sangat jelas, baik dari segi tujuan, program yang akan dilaksanakan, tinggalnya pelaksanaan perda itu bagaimana agar berhasil itu yang perlu didalami lagi, sehingga dikemudian hari Perda ini tidak menimbulkan permasalahan baru” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Tanggal 13 Agustus 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menjadi perhatian dinas terkait.

2. Analisis Terhadap Masalah

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator analisis terhadap masalah diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.4 Analisis Terhadap Masalah

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Masalah yang ditemui dilapangan	11	23	16	50
2	Kaitan masalah dengan Perda	14	27	9	50
3	Perda dibuat sesuai untuk mengatasi masalah yang ada	11	28	11	50
Jumlah		36	78	36	150
Rata-rata		12	26	12	50
Persentase		24%	52%	24%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan diketahui untuk indikator analisis terhadap masalah termasuk pada kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terlaksana sebanyak 26 orang (52%), kemudian menjawab terlaksana dan kurang terlaksana masing-masing sebanyak 12 orang (24%).

Pada item penilaian masalah yang ditemui di lapangan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 11 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 16 orang. Pada item penilaian kaitan masalah dengan perda responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 orang. Pada item penilaian Perda dibuat sesuai untuk mengatasi masalah yang ada responden yang menjawab terlaksana sebanyak 11 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 28 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Perda ini dibuat karena terdapat permasalahan dalam tata laksana retribusi khususnya retribusi di tepi jalan umum, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun. Sejauh ini dalam pelaksanaannya tidak begitu banyak kontroversi, namun ya pastinya yang namanya masalah tetap ada, namun kita berusaha meminimalisir masalah tersebut” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Tanggal 13 Agustus 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dirumuskan untuk menganalisis permasalahan yang ada sehingga dapat dikurangi atau diminimalisir tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.

3. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan, Pengukuran terhadap Tingkatan Perubahan yang Terjadi

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.5 Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan, Pengukuran terhadap Tingkatan Perubahan yang Terjadi

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Sistematika kerja Perda	11	23	16	50
2	Acuan kerja Perda	14	27	9	50
Jumlah		25	50	25	100
Rata-rata		12	25	13	50
Persentase		24%	50%	26%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan diketahui untuk indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi termasuk pada kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terlaksana sebanyak 25 orang (50%), kemudian menjawab kurang terlaksana sebanyak 13 orang (26%) dan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 12 orang (12%).

Pada item penilaian sistematika kerja Perda responden yang menjawab terlaksana sebanyak 11 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23

orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 16 orang. Pada item penilaian acuan kerja Perda responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Standarisasi dan bagaimana pengukurannya jelas ada, pihak pelaksanan membutuhkan standarisasi dan pengukuran ini untuk mengevaluasi sejauh mana perda ini sudah dilaksanakan” (Wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 8 Agustus 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa standarisasi dan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi setelah Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dibuat sudah dirumuskan dengan seksama.

4. Menentukan Apakah Perubahan yang Diamati merupakan Akibat dari Kegiatan Tersebut Atau Karena Penyebab yang Lain

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.6 Menentukan Apakah Perubahan yang Diamati merupakan Akibat dari Kegiatan tersebut Atau Karena Penyebab yang Lain

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah perubahan yang terjadi	13	21	16	50
2	Persen peningkatannya pada setiap tahun	12	24	14	50
	Jumlah	25	45	30	100
	Rata-rata	12	23	15	50
	Persentase	24%	46%	30%	100%
	Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan diketahui untuk indikator menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain termasuk pada kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 orang (46%), kemudian menjawab kurang terlaksana sebanyak 15 orang (30%) dan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 12 orang (12%).

Pada item penilaian jumlah perubahan yang terjadi responden yang menjawab terlaksana sebanyak 13 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 16 orang. Pada item penilaian persen peningkatannya pada setiap tahun responden yang menjawab terlaksana sebanyak 12 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 14 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Banyak dek perubahan yang terjadi sejak adanya perda ini, terutama kita sebagai juru parkir dalam melaksanakan pekerjaan ini lebih jelas lagi serta merasa ada jaminan pekerjaan sehingga masyarakat yang sering parkir di tepi jalan umum seperti ini diharapkan dapat mentaati peraturan yang sudah ada ini” (Wawancara dengan Juru Parkir Tanggal 19 Agustus 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa banyak terdapat perubahan setelah Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dibuat sudah dirumuskan dengan seksama.

5. Beberapa Indikator untuk Menentukan Keberadaan Suatu Dampak

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.7 Beberapa Indikator untuk Menentukan Keberadaan Suatu Dampak

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya retribusi izin mendirikan, memperbaiki, dan membongkar bangunan	14	25	11	50
2	Sikap masyarakat	17	22	11	50
3	Selalu dilakukan revisi	14	27	9	50
Jumlah		45	74	31	150
Rata-rata		15	25	10	50
Persentase		30%	50%	20%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan diketahui untuk indikator beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak termasuk pada kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terlaksana sebanyak 25 orang (50%), kemudian menjawab terlaksana sebanyak 15 orang (30%) dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 orang (20%).

Pada item penilaian meningkatnya retribusi izin mendirikan, memperbaiki, dan membongkar bangunan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11 orang. Pada item penilaian sikap masyarakat responden yang menjawab terlaksana sebanyak 17 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11 orang. Pada item penilaian selalu dilakukan revisi responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“Sejauh yang saya rasakan sikap masyarakat soal parkir ini sangat baik dek, masyarakat mau membayar parkir dan tidak berbantah dengan kami petugas parkir, yaa..sekarang jarang ada yang membantah jika diminta uang parkirnya” (Wawancara dengan Juru Parkir Tanggal 19 Agustus 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa banyak terdapat perubahan setelah Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dibuat sudah dirumuskan dengan seksama.

Masalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahannya perlu di tambah areal parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasanya tinggi, lahan yang ada sangat terbatas dan mahal. Padahal dengan padatnya jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat parkir, retribusi parkir bisa lebih tinggi kontribusinya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti yang diharapkan. Dalam rangka menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas yang dari tahun ke tahun semakin luas di Kabupaten Kuantan Singingi yang dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang terus meningkat serta bertambahnya pusat-pusat perdagangan dan jasa, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah melakukan penertiban pada ruas-ruas jalan yang rawan mengalami kemacetan.

Potensi-potensi di tepi jalan umum merupakan prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan pemungutan retribusi, khususnya untuk kawasan yang merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa, dimana juga dibutuhkan pengawasan dan penertiban yang lebih intensif melalui kegiatan patroli dimana di lokasi-loksai tersebut merupakan lokasi yang rawan kemacetan.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai langkah mengoptimalkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial, memperbaiki basis data objek titik-titik parkir di tepi jalan umum secara sistematis, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain membuat revisi penyusunan Perda yang mengatur di dalamnya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan akan terjadi sebagai langkah menertibkan penyelenggaraan perparkiran, peningkatan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang perparkiran serta menambah jumlah personil/petugas parkir. c. Meningkatkan pengawasan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuantan Singingi untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan

sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pembayaran retribusi pada hakekatnya merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan dalam pembiayaan daerah dan pembangunan daerah. Dalam penggunaan retribusi harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, sederhana, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini berguna untuk memberikan pedoman kebijakan kepada daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum antara lain adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan komunikasi adalah penyampaian informasi pelaksana dan kelompok sasaran, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (mss komunikasi). Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan masih kurang jelas.

Kejelasan penyampaian akan mempermudah setiap bidang terkait memahami kebijakan sehingga kesalahan interpretasi dapat dihindari. Konsistensi komunikasi dari pemerintah kepada pelaksana belum konsisten. Hal ini menimbulkan kebingungan pada pelaksana kebijakan, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara efektif dan efisien. Konsistensi komunikasi perlu dipertahankan agar masyarakat dan pelaksana kebijakan tidak merasa kebijakan yang dibuat tidak berguna dan akan hilang begitu saja.

2. Sumber Daya

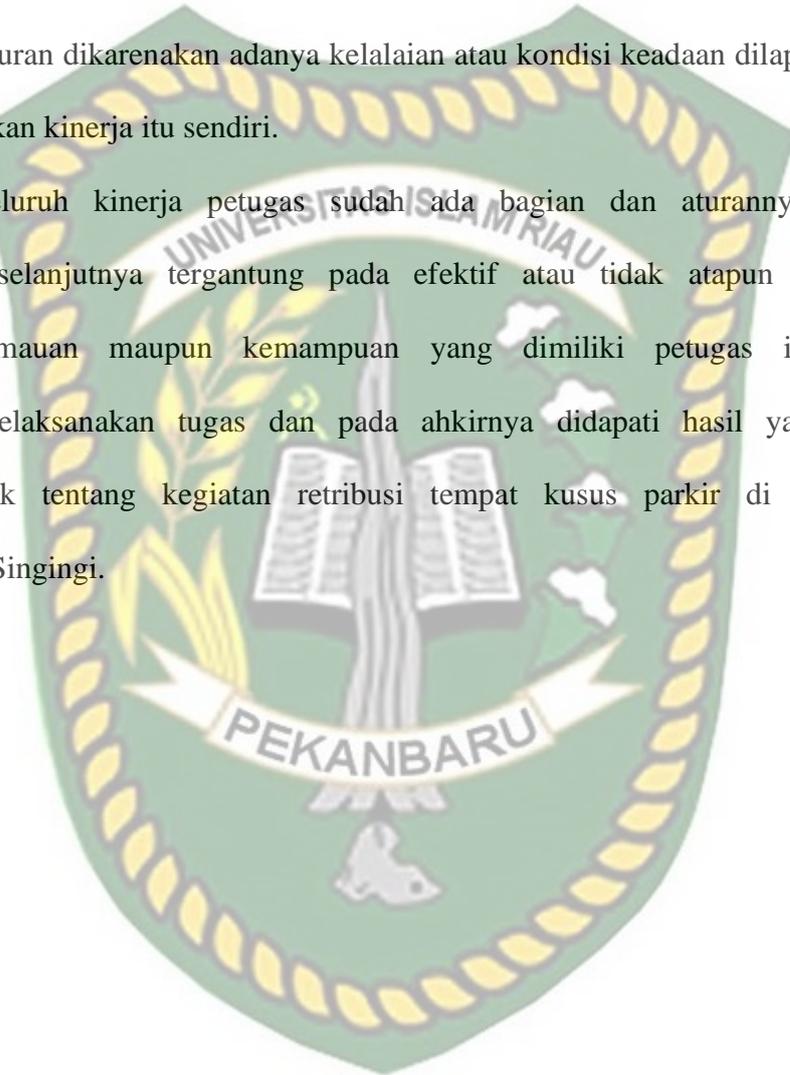
Sumber daya pada pelaksanaan kebijakan merupakan bagian yang penting. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang dibuat dan mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi juga harus membawa kebijakan itu ke tataran praktis. Petugas parkir di Kabupaten Kuantan Singingi masih awam terhadap kebijakan yang berlaku. Hal ini disebabkan petugas masih ragu-ragu melaksanakan kewajibannya sebagai petugas parkir, seperti memberikan karcis parkir.

Pelaksanaan staf lapangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik, hanya pelaksanaannya yang belum merata ke seluruh daerah. Hal ini menyebabkan informasi kebijakan yang akan dilaksanakan belum optimal. Hal ini juga disebabkan oleh jumlah staf pelaksana yang cukup terbatas, sedangkan jangkauan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sangat luas.

3. Struktur Birokrasi

Seluruh kinerja petugas pemerintah maupun petugas parkir dilapangan harus didasarkan pada prosedur aturan yang ada. Namun kenyataan dilapangan masih banyaknya terdapat kinerja yang masih belum bisa optimal dan tidak sesuai dengan aturan dikarenakan adanya kelalaian atau kondisi keadaan dilapangan saat menjalankan kinerja itu sendiri.

Seluruh kinerja petugas sudah ada bagian dan aturannya masing-masing, selanjutnya tergantung pada efektif atau tidak ataupun tergantung pada kemauan maupun kemampuan yang dimiliki petugas itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan pada akhirnya didapati hasil yang efektif atau tidak tentang kegiatan retribusi tempat kusus parkir di Kabupaten Kuantan Singingi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat diambil kesimpulan bahwa Potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bila dikaitkan dengan realisasi kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi belum tergali secara maksimal dan terukur, sehingga penerimaan daerah dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak optimal. Hal ini disebabkan karena Penetapan sistem pemungutan yang belum tepat dan baik, yang menyebabkan adanya kebocoran-kebocoran penerimaan retribusi parkir baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik dari oknum aparat/petugas pengelola parkir, juru parkir/koordinator parkir.

B. Saran

Perlu dilakukan analisis potensi/peluang titik parkir baru melalui uji petik perparkiran dan penyusunan rencana tata ruang parkir, seperti dibangunnya taman parkir atau gedung parkir pada kawasan yang strategis yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa layanan parkir. Lokasi tempat parkir dengan tempat yang dituju harus berada dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan. Lokasi parkir yang mudah dijangkau dan terletak pada pusat komersial suatu kawasan perkotaan

berkaitan dengan kemudahan akses yang diperoleh pengguna. Selain itu, fasilitas parkir harus dirancang supaya aman. Agar penggunaan lokasi parkir menjadi efisien, tidak macet dan tidak terjadi kecelakaan, maka diperlukan pengaturan mengenai spesifikasi elemen desain, luas lahan parkir,



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Keban, T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2008. *Public Policy “Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rianse, Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Dokumen:

Undang-undang 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

